Jurnal Manajerial, Volume 13 Nomor 03 Tahun 2026 **P-ISSN : 2354-8592**
http://dx.doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v13i03.12525 **E-ISSN : 2621-5055**

KEBIJAKAN FISKAL DAN STRUKTUR BELANJA DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN APBD - BUKTI EMPIRIS KABUPATEN SUKOHARJO

Kartika Hendra Titisari[1*]
Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta, Indonesia,
kartikatitisari@gmail.com
**Corresponding Author*

Sumiyati[2]
Program Studi Manajemen, Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta, Indonesia,
9.sumiyati@gmail.com

Diterima : 7 September 2026
Direview : 15 September 2026
Direvisi : 7 November 2026
Disetujui : 10 November 2026

Abstract
Background *– The optimization of the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is not only determined by the ability of local governments to realize revenue and expenditure, but also the quality of the expenditure structure and fiscal policies. In Sukoharjo Regency, revenue realization is relatively strong, but the expenditure structure is still dominated by operational expenditure, while capital expenditure is relatively small.*
Aim – *This study aims to analyze the influence of operational expenditures, capital expenditures, and other expenditures on the optimization of APBD management and test the role of fiscal policy as a moderation variable.*
Design/ Methodology/ Approach *– The study used a quantitative approach with Sukoharjo Regency monthly APBD data for the 2020–2025 period. All observations were used as samples through census techniques. The test was carried out using* Partial Least Squares *(PLS) through the analysis of multicollinearity, determination coefficients, path coefficients, significance, and interaction effects.*
Findings *– Operational expenditure and other expenditure have a negative and significant effect on the optimization of APBD management, while capital expenditure and fiscal policy have a positive and significant effect. Fiscal policy also moderates the influence of the three expenditure components on the optimization of APBD management. The model has a very strong explanatory ability with* an adjusted R^2 *of 0.944.*
Research Implications *– Improving the quality of investment through capital expenditure, tightening the evaluation of other expenses, and strengthening* performance-based budgeting, spending review, *and* monitoring of *outputs and* outcomes.
Limitations *– The research only uses Sukoharjo Regency, so generalizations need to be made carefully. The model does not include institutional, technological, human resources, leadership, internal control, and budget politics.*

Keywords: *APBD, Spending, Fiscal Policy, Optimization of APBD Management*

Abstrak
Latar Belakang – Optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah merealisasikan pendapatan dan belanja, tetapi juga kualitas struktur belanja dan kebijakan fiskal. Di Kabupaten Sukoharjo, realisasi pendapatan relatif kuat, namun struktur belanja masih didominasi belanja operasional, sedangkan belanja modal relatif kecil.
Tujuan – Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja operasional, belanja modal, dan pengeluaran lainnya terhadap optimalisasi pengelolaan APBD serta menguji peran kebijakan fiskal sebagai variabel moderasi.

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

Desain/Metodologi/Pendekatan – Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data APBD bulanan Kabupaten Sukoharjo periode 2020–2025. Seluruh observasi digunakan sebagai sampel melalui teknik sensus. Pengujian dilakukan menggunakan *Partial Least Squares* (PLS) melalui analisis multikolinearitas, koefisien determinasi, koefisien jalur, signifikansi, dan efek interaksi.
Temuan – Belanja operasional dan pengeluaran lainnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan APBD, sedangkan belanja modal dan kebijakan fiskal berpengaruh positif dan signifikan. Kebijakan fiskal juga memoderasi pengaruh ketiga komponen belanja terhadap optimalisasi pengelolaan APBD. Model memiliki kemampuan penjelasan sangat kuat dengan *adjusted* R^2 sebesar 0,944.
Implikasi Penelitian – Pemerintah daerah perlu mengendalikan belanja operasional berdasarkan produktivitas, meningkatkan kualitas investasi melalui belanja modal, memperketat evaluasi pengeluaran lainnya, serta memperkuat *performance-based budgeting*, *spending review*, dan pemantauan *output* serta *outcome*.
Keterbatasan Penelitian – Penelitian hanya menggunakan Kabupaten Sukoharjo sehingga generalisasi perlu dilakukan secara hati-hati. Model belum mencakup faktor kelembagaan, teknologi, sumber daya manusia, kepemimpinan, pengendalian internal, dan politik anggaran.

Kata Kunci: APBD, Belanja, Kebijakan Fiscal, Optimalisasi Pengelolaan APBD

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya publik dan menentukan prioritas belanja. Kewenangan tersebut sekaligus menimbulkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa APBD tidak hanya terserap secara administratif, tetapi mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik dan hasil pembangunan yang efektif. Literatur mengenai desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan kondisi penting bagi keberhasilan desentralisasi (Amin, 2020). Bukti empiris pada pemerintah daerah di Indonesia juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan, kapasitas fiskal, dan alokasi belanja berkaitan erat dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Zamzami & Rakhman, 2023). Kejelasan anggaran, pengendalian akuntansi, dan system pelaporan mencerminkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Nuzul Azmi et al., 2023)

Kondisi ini sejalan dengan hasil audit nasional yang menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah kesulitan menjaga keseimbangan antara serapan anggaran dan efektivitas output. Penelitian terdahulu, termasuk studi efisiensi belanja daerah pada Pemko Sibolga, memperkuat temuan bahwa ketidakseimbangan belanja produktif dapat menurunkan efisiensi fiskal daerah (Frans et al., 2024) . Prinsip *good governance* sangat penting dalam pengelolaan keuangan (Titisari, 2021; Titisari et al., 2019) .

Persoalan tersebut relevan dalam konteks Kabupaten Sukoharjo. Dalam konteks Kabupaten Sukoharjo, data keuangan 2019–2023 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan selalu melampaui target (>100%), namun realisasi belanja hanya berada pada kisaran 92–94%. Ketidakseimbangan ini menimbulkan

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

pertanyaan apakah selisih belanja mencerminkan efisiensi atau justru indikasi inefisiensi akibat rendahnya daya serap. Struktur belanja daerah juga menunjukkan kecenderungan yang belum ideal. Belanja langsung hanya berkisar antara 52–58%, sedangkan belanja modal 11–15%, jauh dari rekomendasi 20–30% untuk memperkuat kapasitas pembangunan jangka panjang. Kondisi ini sejalan dengan hasil audit nasional yang menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah kesulitan menjaga keseimbangan antara serapan anggaran dan efektivitas output.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa struktur belanja dan kinerja fiskal memiliki pengaruh penting terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah. (Panggabean, 2022; Simanjuntak et al., 2025) menyoroti tantangan kapasitas PAD; (Aginta et al., 2023) mengidentifikasi ketimpangan pendapatan antarwilayah; (Amin, 2020) menemukan bahwa pembangunan ekonomi lokal memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap PAD; (Metekohy et al., 2024) menunjukkan sensitivitas PAD terhadap PDRB; (Adewale, 2022) menekankan dampak faktor makro terhadap stagnasi ekonomi; (Karlinda et al., 2015) menegaskan pentingnya belanja modal bagi pertumbuhan; (Ramadhani et al., 2024) menemukan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran meningkatkan belanja modal, serta menegaskan peran insentif fiskal dalam pengambilan keputusan belanja daerah.

Sementara itu efisiensi anggaran dan investasi infrastruktur berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal, mengindikasikan bahwa alokasi anggaran perlu diarahkan lebih efektif (Yusfa et al., 2023). Rasio kinerja fiskal (efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan desentralisasi fiskal) memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun melalui belanja modal sebagai mediator (Zein et al., 2024). Penelitian tersebut menegaskan bahwa kualitas kebijakan fiskal dan komposisi belanja menentukan efektivitas penggunaan anggaran.

Komposisi belanja penting karena setiap kategori belanja memiliki konsekuensi fiskal yang berbeda. Belanja operasional diperlukan untuk mempertahankan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi dominasi belanja rutin dapat mempersempit ruang fiskal bagi investasi produktif. Sebaliknya, belanja modal dapat menciptakan aset publik dan meningkatkan kapasitas pelayanan, meskipun efektivitasnya bergantung pada kualitas perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan pengawasan (Bolen & Payamta, 2019; Isyandi & Trihatmoko, 2022). Bukti empiris juga menunjukkan bahwa kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran berkaitan dengan alokasi belanja modal (Hariani & Febriyastuti, 2020; Ramadhani et al., 2024).

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

Penelitian terdahulu umumnya menguji struktur belanja, kinerja fiskal, atau belanja modal sebagai determinan langsung pertumbuhan ekonomi maupun kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, tetapi besarnya kontribusi bergantung pada bagaimana sumber daya dialokasikan dan dikelola (Putra, 2021; Simanjuntak et al., 2025). Studi mengenai kinerja keuangan daerah juga menekankan pentingnya efisiensi belanja dan struktur pengeluaran (Frans et al., 2024; Sofyan et al., 2025). Namun, hubungan antara komponen belanja tertentu dengan optimalisasi pengelolaan APBD belum tentu bersifat tetap karena dapat dipengaruhi oleh kondisi dan kualitas kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal dapat menjadi mekanisme yang menghubungkan struktur belanja dengan hasil pengelolaan APBD. Kebijakan fiskal menentukan prioritas, disiplin pengeluaran, arah alokasi, serta keseimbangan antara kebutuhan operasional pemerintahan dan pembangunan. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, otonomi daerah hanya akan efektif apabila pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan (Amin, 2020; Matheson, 2005). Oleh karena itu, kebijakan fiskal tidak hanya diperkirakan berpengaruh langsung terhadap optimalisasi APBD, tetapi juga dapat mengubah kekuatan hubungan antara struktur belanja dan optimalisasi tersebut.

Berdasarkan fenomena APBD Kabupaten Sukoharjo, terdapat indikasi ketidakseimbangan antara kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan dan optimalisasi penggunaannya. Realisasi pendapatan yang secara konsisten melampaui target selama periode 2019–2023, sementara realisasi belanja hanya mencapai 92–94%, menunjukkan bahwa pencapaian target pendapatan belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi pengeluaran. Kondisi ini semakin menarik untuk dikaji karena struktur belanja masih didominasi belanja operasional, sedangkan alokasi belanja modal relatif terbatas. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana masing-masing komponen belanja memengaruhi optimalisasi pengelolaan APBD dan apakah kebijakan fiskal dapat menentukan efektivitas hubungan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh belanja operasional, belanja modal, dan pengeluaran lainnya terhadap optimalisasi pengelolaan APBD, sekaligus menganalisis peran kebijakan fiskal sebagai variabel moderasi.

Dengan menggunakan data APBD bulanan Kabupaten Sukoharjo periode 2020–2025, penelitian ini diharapkan memberikan

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

penjelasan empiris mengenai bagaimana struktur belanja dan kondisi kebijakan fiskal secara bersama-sama menentukan optimalisasi pengelolaan anggaran daerah. Kontribusi penelitian terletak pada pengujian struktur belanja secara simultan dan penempatan kebijakan fiskal sebagai faktor kontinjensi yang dapat menjelaskan variasi efektivitas pengelolaan APBD.

TINJAUAN PUSTAKA

Fiscal Federalism Theory dan Pengelolaan APBD

Penelitian ini menggunakan *Fiscal Federalism Theory* sebagai landasan utama untuk menjelaskan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Perspektif *fiscal federalism* menjelaskan pembagian kewenangan pendapatan dan pengeluaran antara pemerintah pusat dan pemerintah subnasional serta implikasinya terhadap efisiensi alokasi sumber daya publik. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk menentukan penggunaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat daerah. Namun, kewenangan tersebut perlu disertai kapasitas fiskal, akuntabilitas, koordinasi antartingkat pemerintahan, dan mekanisme pengawasan agar desentralisasi menghasilkan pelayanan publik yang efektif (OECD, 2021).

Dalam perspektif ini, desentralisasi fiskal tidak hanya dilihat dari besarnya pendapatan dan pengeluaran yang dikelola pemerintah daerah, tetapi juga dari tingkat kewenangan dan diskresi dalam menentukan alokasi serta pelaksanaan pengeluaran**.** OECD (2021) menegaskan bahwa besarnya proporsi pengeluaran pemerintah subnasional belum tentu menunjukkan tingginya otonomi fiskal karena keputusan belanja dapat dibatasi oleh regulasi pemerintah pusat, *earmarked transfers*, dan kewajiban pengeluaran tertentu. Dengan demikian, kualitas pengelolaan fiskal sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah menggunakan kewenangan belanja untuk mencapai tujuan pelayanan dan pembangunan.

Perspektif tersebut relevan dengan pengelolaan APBD karena APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan kewenangan fiskal menjadi program dan kegiatan publik. Oleh karena itu, optimalisasi APBD tidak cukup dipahami berdasarkan besarnya anggaran atau tingkat realisasi, tetapi berdasarkan kemampuan pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya secara efektif, efisien, produktif, dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Penelitian (Zamzami & Rakhman, 2023) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia berkaitan dengan karakteristik daerah, belanja modal, kualitas pelaporan keuangan, serta faktor pengelolaan lainnya.

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

Public Expenditure Management

Untuk menjelaskan hubungan antara struktur belanja dan optimalisasi APBD, penelitian ini juga menggunakan perspektif *Public Expenditure Management (PEM)***.** Perspektif ini menekankan bahwa kualitas keuangan publik ditentukan bukan semata-mata oleh jumlah pengeluaran, tetapi oleh kemampuan pemerintah memastikan bahwa sumber daya publik dialokasikan sesuai prioritas, digunakan secara efisien, dan menghasilkan *outputs* serta *outcomes* yang diharapkan. OECD (2023) menempatkan peningkatan kualitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah sebagai elemen penting dalam kinerja pemerintahan, khususnya karena pemerintah subnasional memiliki posisi strategis dalam penyediaan pelayanan publik dan implementasi kebijakan.

Dalam konteks pemerintah daerah, perspektif tersebut memberikan dasar untuk membedakan karakteristik belanja operasional, belanja modal, dan pengeluaran lainnya**.** Belanja operasional terutama berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas pemerintahan dan pelayanan rutin, sedangkan belanja modal berkaitan dengan pembentukan atau peningkatan aset dan kapasitas pelayanan publik. Pengeluaran lainnya memiliki karakteristik yang lebih heterogen sehingga relevansinya terhadap prioritas pembangunan perlu dinilai berdasarkan fungsi dan manfaatnya. Dengan demikian, komposisi belanja menjadi bagian penting dari proses pengelolaan APBD karena pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya dan harus menentukan prioritas penggunaan anggaran.

OECD (2023) menegaskan pentingnya priority-based budgeting, financial management capacity, asset management, dan public investment management dalam meningkatkan kualitas keuangan pemerintah subnasional di Asia dan Pasifik. Pemerintah subnasional memiliki peran besar dalam penyediaan layanan publik dan investasi sehingga kualitas keputusan pengeluaran menjadi faktor penting dalam efektivitas desentralisasi.

Kebijakan Fiskal sebagai Perspektif Kontinjensi

Penelitian ini memandang kebijakan fiskal sebagai kondisi yang dapat menentukan efektivitas pengelolaan struktur belanja**.** Perspektif ini berangkat dari pemikiran bahwa konsekuensi suatu keputusan pengeluaran tidak selalu sama pada setiap kondisi fiskal. Kualitas kebijakan fiskal tercermin dalam kemampuan pemerintah menetapkan prioritas, menjaga disiplin anggaran, mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta menyelaraskan perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. OECD (2021b) menempatkan kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan sebagai elemen penting agar desentralisasi dapat

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

menghasilkan kinerja sektor publik yang lebih baik.

Dengan demikian, *Fiscal Federalism Theory* memberikan landasan untuk memahami kewenangan dan tanggung jawab fiskal pemerintah daerah, sedangkan perspektif *Public Expenditure Management* menjelaskan pentingnya kualitas dan komposisi pengeluaran dalam mencapai optimalisasi APBD. Perspektif kontinjensi selanjutnya memberikan dasar konseptual bahwa pengaruh struktur belanja dapat bergantung pada kondisi dan kualitas kebijakan fiskal. Ketiga perspektif tersebut menjadi landasan teoritis bagi perumusan hipotesis mengenai pengaruh belanja operasional, belanja modal, pengeluaran lainnya, dan kebijakan fiskal terhadap optimalisasi pengelolaan APBD serta peran moderasi kebijakan fiskal.

Pengembangan Hipotesis

Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD

Desentralisasi fiskal memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menentukan penggunaan sumber daya publik, tetapi kewenangan tersebut harus diikuti akuntabilitas fiskal. Amin (2020) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berkaitan dengan kinerja keuangan dan hasil ekonomi daerah, sehingga kualitas pengelolaan fiskal menjadi faktor penting dalam keberhasilan desentralisasi. Matheson (2005) juga menunjukkan bahwa pengaturan fiskal dapat memengaruhi investasi publik daerah, yang berarti bahwa lingkungan fiskal membentuk kapasitas dan insentif pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya kepada belanja produktif. Dalam penelitian ini, optimalisasi pengelolaan APBD dipahami sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi anggaran sehingga sumber daya publik menghasilkan manfaat yang efektif dan efisien.

Belanja Operasional dan Optimalisasi Pengelolaan APBD

Belanja operasional mendukung fungsi pemerintahan, administrasi, pegawai, dan pelayanan publik yang berlangsung secara rutin. Keberadaannya diperlukan, sehingga persoalannya bukan apakah belanja operasional harus ada, melainkan apakah pertumbuhannya proporsional dengan peningkatan pelayanan dan sasaran pembangunan. Penelitian mengenai kinerja keuangan daerah menekankan pentingnya efisiensi dan komposisi antara belanja operasional dan belanja modal (Frans et al., 2024; Sari et al., 2024). Ketika belanja rutin menjadi dominan tanpa diikuti peningkatan output pelayanan, ruang fiskal untuk investasi produktif dapat menyempit.

Dalam konteks Kabupaten Sukoharjo, dominasi belanja operasional berpotensi membatasi kemampuan pemerintah daerah mengalihkan sumber daya menuju program

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang. Argumentasi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa desentralisasi membutuhkan disiplin dalam mengalokasikan sumber daya fiskal (Amin, 2020). Dengan demikian:

H_1: Belanja operasional berpengaruhf terhadap optimalisasi pengelolaan APBD.

Belanja Modal dan Optimalisasi Pengelolaan APBD

Belanja modal merupakan investasi pada aset yang diharapkan memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Belanja tersebut dapat memperkuat kapasitas pelayanan publik dan menciptakan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi daerah. Bukti empiris di Indonesia menunjukkan bahwa belanja modal berkaitan dengan kinerja keuangan dan pembangunan ekonomi daerah, meskipun efektivitasnya dipengaruhi kapasitas fiskal dan kualitas alokasi (Bolen & Payamta, 2019; Isyandi & Trihatmoko, 2022; Ramadhani et al., 2024; Zein et al., 2024) juga menunjukkan pentingnya kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam menentukan alokasi belanja modal.

Namun, peningkatan proporsi belanja modal tidak otomatis menjamin pengelolaan APBD yang lebih baik. Investasi publik membutuhkan penentuan prioritas, penganggaran realistis, pelaksanaan tepat waktu, dan pengawasan yang efektif. Hubungan positif diperkirakan terjadi ketika belanja modal diarahkan pada investasi publik yang produktif dan relevan. Oleh karena itu:

H_2: Belanja modal berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan APBD.

Pengeluaran Lainnya dan Optimalisasi Pengelolaan APBD

Pengeluaran lainnya mencakup komponen APBD di luar belanja operasional dan belanja modal yang memiliki karakteristik beragam serta tingkat keterkaitan yang berbeda dengan prioritas pembangunan. Dalam perspektif pengelolaan keuangan publik, pengeluaran yang tidak memiliki hubungan jelas dengan sasaran strategis dapat mengurangi ruang fiskal dan menurunkan efisiensi belanja. Prinsip efisiensi anggaran menghendaki agar pengeluaran publik dinilai berdasarkan manfaat yang dihasilkan, bukan hanya berdasarkan tingkat realisasinya (Putra, 2021).

Karakter pengeluaran lainnya yang heterogen membuat kategori tersebut membutuhkan pengawasan dan prioritas yang lebih kuat. Apabila meningkat tanpa kontribusi yang jelas terhadap pelayanan atau pembangunan, optimalisasi APBD dapat menurun. Dengan demikian:

H_3: Pengeluaran lainnya berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan APBD.

Kebijakan Fiskal sebagai Moderator

Pengaruh struktur belanja terhadap optimalisasi APBD tidak harus sama pada setiap kondisi fiskal. Kebijakan fiskal

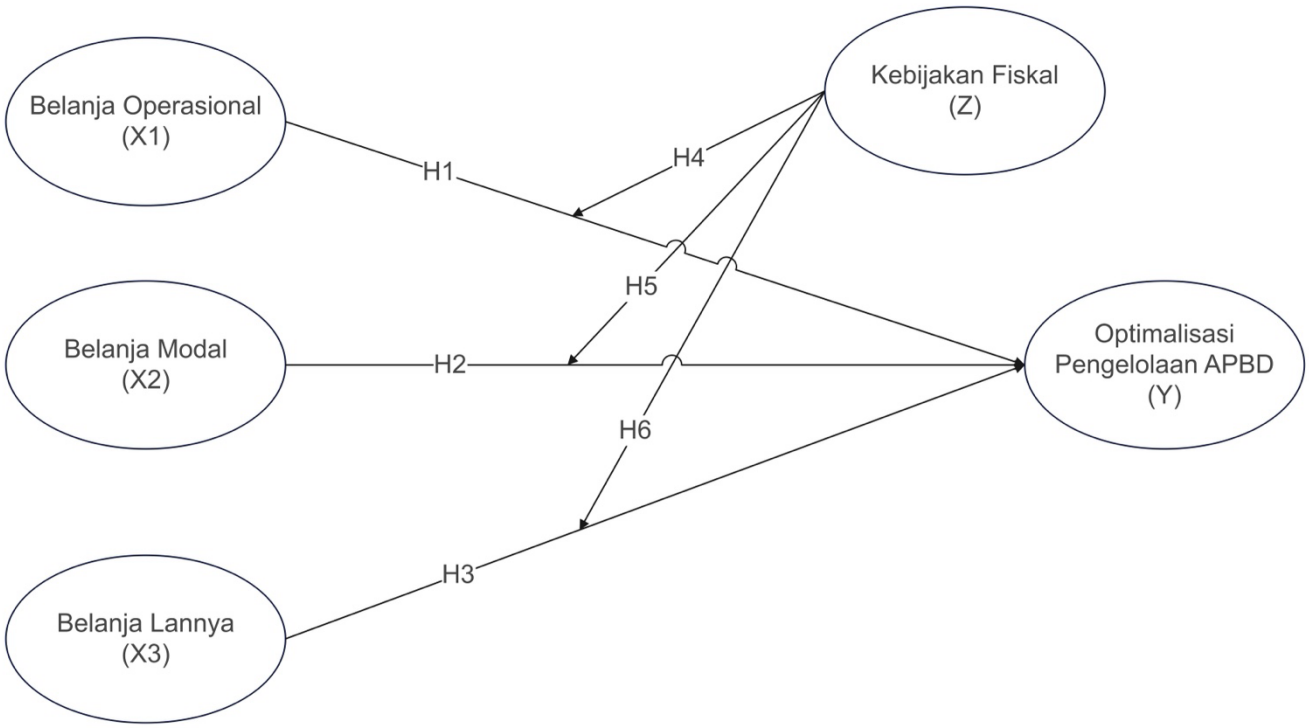
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

menentukan apakah belanja operasional dikendalikan, belanja modal diprioritaskan dan dilaksanakan secara efektif, serta pengeluaran lainnya mendapatkan justifikasi dan pengawasan yang memadai. Karena itu, kebijakan fiskal dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara struktur belanja dan optimalisasi APBD. Perspektif ini memperluas penelitian sebelumnya yang lebih banyak menguji hubungan langsung antara belanja, kinerja fiskal, dan pembangunan ekonomi (Putra, 2021; Simanjuntak et al., 2025). Kebijakan fiskal menentukan arah pendapatan, belanja, dan keseimbangan fiskal sehingga memengaruhi kemampuan pemerintah daerah menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mencapai tujuan pembangunan. Bukti pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa kinerja fiskal, efisiensi belanja, dan kemandirian fiskal merupakan dimensi penting pengelolaan keuangan (Amin, 2020; Hariani & Febriyastuti, 2020; Zamzami & Rakhman, 2023). Sofyan et al. (2025) juga menekankan relevansi efisiensi

H_4: Kebijakan fiskal memoderasi pengaruh belanja operasional terhadap optimalisasi pengelolaan APBD.

H_5: Kebijakan fiskal memoderasi pengaruh belanja modal terhadap optimalisasi pengelolaan APBD.

H_6: Kebijakan fiskal memoderasi pengaruh pengeluaran lainnya terhadap optimalisasi pengelolaan APBD.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi penelitian terdiri atas data APBD bulanan Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020–2025. Teknik sensus digunakan karena seluruh observasi bulanan yang tersedia dalam periode penelitian dimasukkan sebagai sampel. Data berasal dari sumber data APBD dan informasi statistik pendukung yang digunakan dalam laporan penelitian.

Optimalisasi pengelolaan APBD diukur melalui indikator yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran, tingkat realisasi, serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Belanja operasional direpresentasikan melalui proporsi dan realisasinya terhadap total belanja. Belanja modal direpresentasikan melalui proporsi dan realisasinya terhadap total belanja. Pengeluaran lainnya direpresentasikan melalui nilai, proporsi, dan variasinya antarperiode. Kebijakan fiskal direpresentasikan melalui indikator yang mencerminkan kemandirian fiskal, belanja terhadap pendapatan, dan keseimbangan fiskal.

Pengujian hipotesis menggunakan *Partial Least Squares* (PLS). Karena konstruk utama dalam model empiris menggunakan indikator tunggal, evaluasi difokuskan pada multikolinearitas dan model struktural, bukan pengujian reliabilitas konstruk multi-indikator. Model struktural dievaluasi melalui koefisien jalur, signifikansi, efek interaksi, dan koefisien determinasi. Signifikansi estimasi diuji menggunakan bootstrapping sesuai pendekatan PLS (Ghozali & Latan, 2014; Hair et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Profil deskriptif menunjukkan bahwa struktur belanja daerah didominasi belanja operasional, sedangkan belanja modal memiliki proporsi yang jauh lebih kecil. Pengeluaran lainnya memiliki rata-rata yang rendah tetapi variasi yang relatif besar. Kebijakan fiskal juga menunjukkan variasi antarperiode. Pola tersebut mendukung relevansi pengujian pengaruh langsung dan moderasi karena hubungan antarvariabel tidak dapat diasumsikan konstan pada seluruh kondisi fiskal.

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif variabel penelitian selama periode 2020–2025 berdasarkan nilai mean, median, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja operasional memiliki rata-rata tertinggi sebesar 73,426, sedangkan belanja modal hanya sebesar 9,773, yang mengindikasikan bahwa struktur belanja Kabupaten Sukoharjo masih didominasi oleh pengeluaran operasional dibandingkan investasi publik. Kebijakan fiskal memiliki rata-rata sebesar 104,064 dengan standar deviasi 69,263, menunjukkan variasi yang

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

relatif tinggi antarperiode. Sementara itu, optimalisasi pengelolaan APBD memiliki rata-rata 93,602 dan standar deviasi 52,110, yang mencerminkan adanya fluktuasi capaian pengelolaan anggaran selama periode pengamatan. Pengeluaran lainnya menunjukkan rata-rata terendah sebesar 3,172, tetapi memiliki rentang nilai yang cukup lebar, yaitu 0,000 hingga 24,792, serta standar deviasi 6,068. Perbedaan nilai mean dan median pada kebijakan fiskal serta pengeluaran lainnya juga mengindikasikan adanya variasi distribusi data antarperiode. Secara keseluruhan, karakteristik tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan komposisi belanja dan variasi kondisi fiskal daerah, sehingga memperkuat relevansi pengujian pengaruh struktur belanja dan peran kebijakan fiskal terhadap optimalisasi pengelolaan APBD.

Outer Model (Model Pengukuran)

Berdasarkan model struktural yang dibangun, seluruh variabel laten dalam penelitian ini, yaitu Belanja Operasional, Belanja Modal, Pengeluaran Lainnya, Kebijakan Fiskal, dan Optimalisasi Pengelolaan, diukur menggunakan konstruk indikator tunggal (*single-item construct*), sehingga tidak perlu ada pengujian validitas dan reliabilitas. Penilaian model pengukuran dengan menguji multikolonieritas. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat digunakan untuk menguji hal ini. Nilai VIF yang dihasilkan kurang dari 10 mengindikasikan tidak terdapat multikolonieritas.

Evaluasi Model Struktural

Model struktural menunjukkan kemampuan penjelasan yang sangat kuat terhadap optimalisasi pengelolaan APBD. Nilai adjusted R-square sebesar 0,944 menunjukkan bahwa kombinasi struktur belanja, kebijakan fiskal, dan interaksi keduanya menjelaskan sebagian besar variasi pada variabel dependen. Hasil tersebut sebaiknya dipahami sebagai bukti bahwa struktur belanja dan kebijakan fiskal merupakan dimensi penting pengelolaan APBD, bukan sebagai bukti bahwa tidak terdapat determinan lain.

Analisis Jalur

Hasil pengujian struktural menunjukkan bahwa ketujuh hubungan yang dirumuskan dalam model penelitian signifikan. Belanja operasional berpengaruh negatif terhadap optimalisasi pengelolaan APBD, belanja modal berpengaruh positif, pengeluaran lainnya berpengaruh negatif, dan kebijakan fiskal berpengaruh positif. Ketiga efek interaksi juga signifikan, yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal mengubah kekuatan hubungan antara komponen belanja dan optimalisasi APBD.

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tabel 1. Statistik deskriptif

Variabel	Mean	Median	Minimum	Maksimum	SD
Belanja modal	9,773	9,358	0,000	28,855	6,744
Belanja operasional	73,426	72,558	37,927	100,000	14,731
Kebijakan fiskal	104,064	86,589	23,616	428,799	69,263
Optimalisasi pengelolaan APBD	93,602	85,889	20,684	304,498	52,110
Pengeluaran lainnya	3,172	0,117	0,000	24,792	6,068

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2026

Tabel 2. Nilai Variance Inflation

Keterangan	VIF
Belanja Modal	1.000
Belanja Operasional	1.000
Kebijakan Fiskal	1.000
Optimalisasi Pengelolaan APBD	1.000
Pengeluaran Lainnya	1.000
Kebijakan Fiskal x Belanja Modal	1.000
Kebijakan Fiskal x Belanja Operasional	1.000
Kebijakan Fiska x Pengeluaran Lainnya	1.000

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2026

Tabel 3. Koefisien determinasi

Konstruk Dependen	Adjusted R^2	Interpretasi
Optimalisasi pengelolaan APBD	0,944	Kemampuan penjelasan sangat kuat

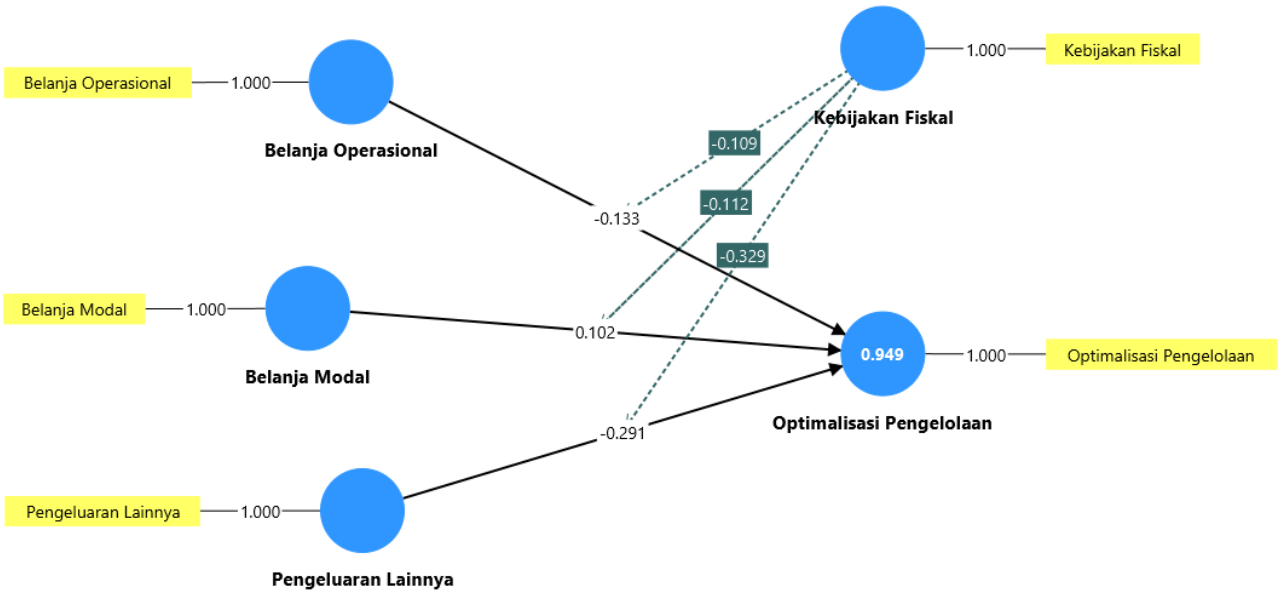
Sumber : Hasil olah data penelitian, 2026

Tabel 4. Hasil analisis jalur

Hubungan	Koefisien	p-value	Keputusan
Belanja operasional → Optimalisasi APBD	−0,133	0,002	Didukung
Belanja modal → Optimalisasi APBD	0,102	0,049	Didukung
Pengeluaran lainnya → Optimalisasi APBD	−0,291	<0,001	Didukung
Kebijakan fiskal → Optimalisasi APBD	0,759	<0,001	Didukung
Kebijakan fiskal × Belanja operasional → Optimalisasi APBD	−0,109	0,014	Didukung
Kebijakan fiskal × Belanja modal → Optimalisasi APBD	−0,112	0,005	Didukung
Kebijakan fiskal × Pengeluaran lainnya → Optimalisasi APBD	−0,329	<0,001	Didukung

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2026

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License



Gambar 2. Nilai Keofisien Jalur
Sumber : Hasil olah data penelitian, 2026

Pembahasan

Pengaruh Belanja Operasional terhadap Optimalisasi Pengelolaan APBD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja operasional berpengaruh negatif terhadap optimalisasi pengelolaan APBD. Temuan ini mengindikasikan bahwa dominasi pengeluaran rutin yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas pelayanan publik berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran daerah. Belanja operasional pada dasarnya diperlukan untuk menjamin keberlangsungan administrasi pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik. Namun, peningkatan belanja tersebut perlu mempertimbangkan ketersediaan ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang. Persoalan utama bukan terletak pada keberadaan belanja operasional, melainkan pada kemampuan pemerintah daerah memastikan bahwa pengeluaran rutin sebanding dengan manfaat pelayanan yang dihasilkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Frans et al. (2024 dan Sari et al. (2024) yang menekankan pentingnya efisiensi dan keseimbangan komposisi belanja dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam perspektif Fiscal Federalism Theory, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskal harus disertai kemampuan menentukan prioritas alokasi yang efektif dan akuntabel (Amin, 2020). Oleh karena itu, pengendalian belanja operasional perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui evaluasi belanja pegawai, rasionalisasi standar biaya, spending review, dan penganggaran berbasis kinerja. Pendekatan tersebut diperlukan agar belanja operasional tetap mendukung

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

keberlangsungan pelayanan publik tanpa mengurangi kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Optimalisasi Pengelolaan APBD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan APBD. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengeluaran yang diarahkan pada pembentukan aset dan pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan ekonomi daerah. Berbeda dengan belanja operasional yang manfaatnya terutama berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas pemerintahan, belanja modal memiliki orientasi investasi jangka panjang. Temuan ini mendukung penelitian Bolen & Payamta (2019; Isyandi & Trihatmoko, (2022) dan Zein et al. (2024) yang menunjukkan pentingnya belanja modal dalam mendukung kinerja keuangan dan pembangunan ekonomi daerah. Ramadhani et al. (2024) juga menegaskan bahwa kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal. Meskipun demikian, peningkatan belanja modal tidak secara otomatis menghasilkan optimalisasi APBD. Efektivitas investasi publik sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan, kesesuaian proyek dengan kebutuhan masyarakat, kualitas pelaksanaan, dan pengawasan terhadap manfaat aset yang dihasilkan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu menggeser orientasi penganggaran dari sekadar pemenuhan alokasi belanja modal menuju pengelolaan investasi publik yang berorientasi pada hasil. Setiap investasi harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Pengaruh Pengeluaran Lainnya terhadap Optimalisasi Pengelolaan APBD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran lainnya berpengaruh negatif terhadap optimalisasi pengelolaan APBD. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengeluaran yang tidak didasarkan pada prioritas dan pertimbangan manfaat yang jelas berpotensi mengurangi efisiensi penggunaan sumber daya publik. Karakteristik pengeluaran lainnya yang relatif heterogen menyebabkan komponen ini membutuhkan pengawasan dan justifikasi penggunaan anggaran yang lebih kuat. Berbeda dengan belanja operasional yang mendukung keberlangsungan aktivitas pemerintahan dan belanja modal yang diarahkan pada pembentukan aset, pengeluaran lainnya memerlukan evaluasi lebih mendalam mengenai urgensi, sasaran penerima manfaat, dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan Putra (2021) yang menekankan bahwa efisiensi

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

anggaran perlu dilihat dari kemampuan pengeluaran pemerintah mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Dalam perspektif Public Expenditure Management, kualitas pengeluaran publik tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap anggaran, tetapi juga oleh kesesuaian alokasi dengan prioritas dan manfaat yang dihasilkan (OECD, 2023). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme evaluasi pengeluaran lainnya melalui spending review, penilaian urgensi program, serta pengawasan berbasis output dan outcome. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki kontribusi yang terukur terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Peran Moderasi Kebijakan Fiskal pada Belanja Operasional terhadap Optimalisasi Pengelolaan APBD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memoderasi hubungan antara belanja operasional dan optimalisasi pengelolaan APBD. Temuan ini memberikan pemahaman bahwa konsekuensi belanja operasional terhadap kualitas pengelolaan anggaran tidak dapat dilepaskan dari kondisi dan arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Kebijakan fiskal menentukan bagaimana kebutuhan operasional diprioritaskan, dikendalikan, dan diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, pengaruh belanja operasional terhadap optimalisasi APBD tidak selalu sama pada setiap kondisi fiskal. Apabila kebijakan pengelolaan fiskal tidak mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan rutin dan pembiayaan pembangunan, dominasi belanja operasional berpotensi semakin membatasi ruang fiskal untuk kegiatan produktif. Temuan ini memperluas argumentasi Amin (2020) mengenai pentingnya kapasitas dan disiplin fiskal dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam konteks pengelolaan APBD, kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk memastikan bahwa pengeluaran rutin benar-benar mendukung produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengendalian belanja operasional tidak cukup dilakukan melalui pembatasan anggaran, tetapi perlu disertai evaluasi manfaat, pengukuran kinerja, dan penyesuaian alokasi berdasarkan prioritas pembangunan. Kebijakan fiskal dengan demikian berperan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional pemerintahan dan kemampuan daerah membiayai program pembangunan yang lebih produktif.

Peran Moderasi Kebijakan Fiskal pada Belanja Modal terhadap Optimalisasi Pengelolaan APBD

Kebijakan fiskal terbukti memoderasi hubungan antara belanja modal dan optimalisasi pengelolaan APBD. Temuan ini mengindikasikan bahwa kontribusi belanja

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

modal terhadap optimalisasi pengelolaan anggaran bergantung pada kondisi kebijakan fiskal yang melingkupinya. Investasi publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, penentuan prioritas, dan kemampuan pemerintah daerah mengelola pelaksanaan proyek. Dengan demikian, peningkatan kapasitas fiskal tidak selalu diikuti peningkatan manfaat investasi apabila tidak disertai pengelolaan yang tepat. Temuan ini sejalan dengan (Bolen & Payamta (2019) dan Ramadhani et al. (2024) yang menunjukkan bahwa alokasi belanja modal berkaitan dengan kinerja keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran. Matheson (2005) juga menjelaskan bahwa pengaturan fiskal dapat memengaruhi keputusan investasi publik pemerintah daerah. Dalam konteks Kabupaten Sukoharjo, kebijakan fiskal perlu memastikan bahwa investasi publik diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang memiliki manfaat nyata dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memperkuat seleksi proyek berdasarkan prioritas, meningkatkan kualitas perencanaan investasi, serta melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan aset yang telah dibangun. Dengan demikian, keberhasilan belanja modal tidak semata-mata diukur dari kemampuan merealisasikan anggaran, tetapi dari kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Peran Moderasi Kebijakan Fiskal pada Pengeluaran Lainnya terhadap Optimalisasi Pengelolaan APBD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal juga memoderasi hubungan antara pengeluaran lainnya dan optimalisasi pengelolaan APBD. Temuan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pengeluaran lainnya dan kualitas pengelolaan anggaran sangat berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah menetapkan prioritas dan mengendalikan pengeluaran. Karakteristik pengeluaran lainnya yang beragam menyebabkan komponen ini membutuhkan mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban yang lebih kuat. Ketika pengeluaran tidak memiliki justifikasi yang memadai dan tidak diarahkan pada pencapaian sasaran strategis, penggunaan sumber daya publik berpotensi menjadi kurang produktif. Peran kebijakan fiskal menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki dasar pertimbangan yang jelas, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Temuan ini memperkuat argumentasi (Putra, 2021) bahwa efisiensi anggaran berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengarahkan pengeluaran untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan pembangunan. Dalam perspektif Public Expenditure Management, pengelolaan pengeluaran pemerintah harus didasarkan pada prioritas, efisiensi, dan pencapaian hasil

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

yang diharapkan (OECD, 2023). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme spending review, pengendalian internal, dan evaluasi berbasis kinerja terhadap pengeluaran lainnya. Setiap alokasi perlu memiliki tujuan yang jelas, penerima manfaat yang teridentifikasi, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi. Pendekatan tersebut diperlukan agar pengeluaran yang kurang produktif tidak menggeser pembiayaan program pembangunan yang lebih prioritas.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja operasional, belanja modal, dan pengeluaran lainnya terhadap optimalisasi pengelolaan APBD serta menguji peran kebijakan fiskal sebagai variabel moderasi di Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja operasional dan pengeluaran lainnya berpengaruh negatif terhadap optimalisasi pengelolaan APBD, sedangkan belanja modal berpengaruh positif. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dan realisasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas struktur belanja, produktivitas pengeluaran, dan kesesuaian alokasi dengan prioritas pembangunan daerah.

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa kebijakan fiskal memoderasi hubungan antara ketiga komponen belanja dan optimalisasi pengelolaan APBD. Berdasarkan signifikansi pengaruh langsung kebijakan fiskal dan ketiga efek interaksinya, kebijakan fiskal dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai quasi moderator (moderasi semu), yaitu variabel yang memiliki pengaruh langsung terhadap optimalisasi pengelolaan APBD sekaligus memoderasi hubungan antara struktur belanja dan optimalisasi pengelolaan APBD. Secara lebih spesifik, kebijakan fiskal memoderasi hubungan belanja operasional dengan arah interaksi negatif, yang menunjukkan bahwa peningkatan indikator kebijakan fiskal berkaitan dengan semakin negatifnya hubungan belanja operasional terhadap optimalisasi APBD. Pada belanja modal, kebijakan fiskal juga menunjukkan interaksi negatif, yang mengindikasikan bahwa kontribusi positif belanja modal terhadap optimalisasi APBD cenderung melemah seiring peningkatan indikator kebijakan fiskal.

Sementara itu, moderasi kebijakan fiskal pada pengeluaran lainnya menunjukkan arah interaksi negatif dengan besaran koefisien absolut paling tinggi dibandingkan kedua interaksi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan pengeluaran lainnya dengan optimalisasi APBD lebih sensitif terhadap perubahan indikator kebijakan fiskal dalam model penelitian. Ketiga temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas struktur belanja bersifat kondisional dan tidak dapat

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

dipisahkan dari kondisi fiskal yang menyertainya.

IMPLIKASI PENELITIAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi APBD ditentukan oleh kualitas struktur belanja dan kebijakan fiskal, bukan hanya tingkat realisasi anggaran. Secara teoretis, temuan memperkuat perspektif *fiscal federalism* bahwa kewenangan fiskal perlu disertai pengelolaan sumber daya yang efektif dan akuntabel. Secara praktis, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mengendalikan belanja operasional berdasarkan produktivitas, mengarahkan belanja modal pada investasi publik yang memberikan manfaat jangka panjang, serta memperketat evaluasi pengeluaran lainnya. Penguatan kebijakan fiskal, *spending review*, penganggaran berbasis kinerja, serta pemantauan *output* dan *outcome* diperlukan untuk memastikan APBD menghasilkan manfaat publik secara optimal.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis menyampaikan terima kasih kepada DPPM Kemdiktisaintek, Universitas Islam Batik Surakarta, dan PEMDA Sukoharjo yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Adewale, A. (2022). An Empirical Analysis of Macroeconomic Factors Influencing the Effectiveness of Monetary Policies in Developing Countries: The Case of Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development*. https://doi.org/10.7176/JESD/13-18-04

Aginta, H., Gunawan, A. B., & Mendez, C. (2023). Regional income disparities and convergence clubs in Indonesia: new district-level evidence. *Journal of the Asia Pacific Economy*, *28*(1), 101–132. https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1868107

Amin, M. (2020). Effect of Fiscal Decentralization Financial Performance Against Local And Regional Gross Domestic Product (GDP) NTB. *Applied Economics and Finance*, *7*(4), 169. https://doi.org/10.11114/aef.v7i4.4921

Bolen, K. K., & Payamta. (2019). The Effect of Financial Performance and Balanced Funds on Capital Expenditure of Local Government in District/City in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, *9*(4), 129. https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15583

Frans, A., Simamora, M., Deliana, D., & Napitupulu, I. H. (2024). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018-2022. *Dinasti Reearch*, *5*(4). https://doi.org/10.38035/jafm.v5i4

Ghozali, I., & Latan, H. (2014). *Partial Least Squares : Konsep, Metode dan Aplikasi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Hair, J. F. ., Black, W. C. ., Babin, B. J. ., & Anderson, R. E. . (2014). *Multivariate data analysis*. Pearson Education Limited.

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hair, J. F., Hult, G. T., Ringle, C. , M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.

Hariani, E., & Febriyastuti, R. (2020). The Effect of Fiscal Stress, Original Local Government Revenue and Capital Expenditures on Efficiency Ratio of Government Independence Performance. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *12*(1). https://doi.org/10.17977/um002v12i12020p018

Isyandi, B., & Trihatmoko, R. A. (2022). An Analysis of Regional Economic Performance of Riau on the Capital Expenditure Budget: A Study of Indonesian Territorial Economics. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, *9*(2), 33–45. https://doi.org/10.18488/74.v9i2.3024

Karlinda, E., Rheza, B., Damanik, M. I., Agustine, T. E., & Sianturi, M. N. (2015). *Laporan PeneliŸ an Optimalisasi Fiskal bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Peran Belanja Operasional dan Belanja Modal dalam APBD*.

Matheson, T. (2005). Does fiscal redistribution discourage local public investment? *Economics of Transition*, *13*(1), 139–162. https://doi.org/10.1111/j.1468-0351.2005.00210.x

Metekohy, S., Dharmawan, D., Harahap, I., & Munizu, M. (2024). Analysis Of Regional Own-Source Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund And Economic Growth On The Local Government Capital Expenditure. *International Journal of Economics Development Research*, *5*(2), 1375–1390.

Nuzul Azmi, F., Yaya, R., & Tumirin. (2023). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Manajerial*, *10*(2). https://doi.org/10.30587/manajerial.v10i02.4619

OECD. (2021a). *Education at a Glance 2021*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en

OECD. (2021b). *Fiscal Federalism 2022*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/201c75b6-en

OECD. (2023). *Multi-level governance and subnational finance in Asia and the Pacific*. https://doi.org/10.1787/f3e8a2fb-en

Panggabean, L. (2022). Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(2), 2022. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue

Putra, W. (2021). Effect of budget efficiency on economic growth. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, *2*(16). https://doi.org/10.26661/2522-1566/2021-1/16-05

Ramadhani, S., Masnila, N., Dwitayanti, Y., & Negeri Sriwijaya, P. (2024). Pengaruh Kemandirian Fiskal dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, *4*(1).

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License

Sari, E. N., Susanti, N., & Kresnawati, K. (2024). Analysis Of The Ratio Of Compatibility Between Capital Expenditure, Operational Expenditure, Effectiveness Ratio, And Efficiency Ratio Of Regional Original Revenue Of The Bengkulu City Government. *Bengkulu International Conference on Economics, Management, Business and Accounting (BICEMBA)*, *2*, 1593–1608. https://doi.org/10.33369/bicemba.2.2024.89

Simanjuntak, G. Y., Maya Yulika, Dewi Nopika Putri, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(6), 260–273. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5158

Sofyan, A., Nurjaman, K., & Joharudin, A. (2025). Examining Spending Efficiency and Budget Realization Growth in Regional Financial Performance: A Study of West Java Province. In *International Journal of Science and Society* (Vol. 7, Number 1). http://ijsoc.goacademica.com

Titisari, K. H. (2021). *Corporate Governance: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktikal di Indonesia*. Kekata Group.

Titisari, K. H., Moeljadi, Indrawati, N. K., & Kusumastuti, R. (2019). The roles of cost of capital, corporate governance , and corporate social responsibility in improving firm value : evidence from Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations*, *16*(4), 28–36. https://doi.org/10.21511/imfi.16(4).2019.03

Yusfa, E., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2023, July). *Impact of budget allocation policy and fiscal decentralization towards economic growth*.

Zamzami, F., & Rakhman, F. (2023). Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, *12*(5), 332–347. https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0148

Zein, M. H. M., Muhtarom, M., Mulyadi, M., & Septiani, S. (2024). Examining the Role of Local Government's Financial Performance and Capital Expenditure in Increasing Economic Growth in Banten Province, Indonesia (2018–2022). *Journal of Risk and Financial Management*, *17*(10). https://doi.org/10.3390/jrfm17100456

Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License